

1. mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah atau PERDA Kendal mengenai Gugus Tugas Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Kerjasama Polres Kendal dengan Dinas Tenaga Kerja kendal sangat penting dilakukan sehingga akan mendorong penanganan kejahatan human *trafficking* secara optimal. Penanganan kejahatan human trafficking akan dapat berhasil dengan baik apabila terwujud kerjasama Polres dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten. Dengan demikian, kerjasama Polres dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten akan dapat mendukung Penanganan kejahatan human *trafficking*.

DAFTAR PUSTAKA

Sonny Sumarsono, **Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan**, (Yogyakarta : Graha Ilmu), 2003, hal 292.

Nawawi Barda, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan**, (Jakarta: Kencana), 2007, Hal.61.

Hamzah Andi, **Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, (Bandung: Binacipta), 1986, Hal 33.

Dikdik. M. Arief Mansur, **Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita**, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2007, Hal 31.

Jeremy Bentham, **Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana**, (Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa), 2006, Hal 316.

Endang dan Yudo Swasono, **Pengembangan Sumber Daya Manusia**, (Jakarta : Cv. Izufa Gempita), 1993, hal 22

Lilik Mulyadi, **Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi**, (Jakarta: Djambatan), 2007, Hal 120

Arif Gosita, **Masalah Korban Kejahatan**, (Jakarta: Akademika Pressindo), 1993, Hal 50.

Arief Amrullah, **Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**, dalam Satya Arinanto dan NinukTriyani (Ed), **Memahami Hukum dari Kontruksi sampai implemeuntasi**, (Jakarta :Raja Grapindo Persada), 2009, hlm 128.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, (jakarta :Rajawali), 1985, Hlm: 52.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Peraturan tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Pemulihan bagi Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Kendal

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Korban Perdagangan Orang Dan
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

LAMPIRAN